

**PROPOSAL USULAN KEGIATAN TAHUN 2019**  
**BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM**  
**SETDA PROV. JATENG**

PROGRAM : Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KEGIATAN : Program Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan daerah bidang  
Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

ANGGARAN : Rp. 1.250.000.000,-

## **1. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Jawa Tengah, meningkatnya produksi pangan pokok menjadi sasaran utama yang harus diwujudkan. Peningkatan produksi pangan akan dapat terwujud dengan adanya dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian yang memadai.

Salah satu terobosan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga petani adalah dengan meluncurkan "Program Pengembangan Pertanian Modern" yang berbasis pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian secara penuh, mulai tahap pengolahan tanah sampai panen dan pasca panen. Program ini bertujuan untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja yang menyebabkan biaya produksi yang semakin tinggi, mempercepat proses produksi, menekan kehilangan hasil dan meningkatkan pendapatan petani sehingga menarik generasi muda untuk terlibat pada sektor pertanian.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengimplementasikan Program dari Kementerian Pertanian antara lain dengan pemberian bantuan kepada petani berupa alsintan, pelatihan, pemasaran hasil pertanian dan modernisasi petani dalam bidang perbankan dengan program unggulannya yaitu "Kartu Tani" yang pada program awalnya digunakan untuk pembelian pupuk, selanjutnya berkembang dengan berbagai fungsi yang dapat membawa petani ke arah modernisasi petani. Untuk menunjang keberhasilan pertanian, sarana produksi berupa pupuk mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan produksi pertanian. Ketergantungan petani kepada pupuk anorganik untuk meningkatkan produksi pertanian menjadikan pupuk sebagai barang yang amat berharga dan sangat dibutuhkan petani, baik itu di bidang pertanian, peternakan, perkebunan maupun perikanan.

a. Program Pengembangan Kartu Tani

Pemerintah telah memberikan subsidi terhadap harga pupuk, dengan harapan petani dapat memperoleh pupuk dengan harga terjangkau untuk meningkatkan produksi pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Pupuk sebagai barang bersubsidi dalam pelaksanaan di lapangan tentu akan rawan dengan penyimpangan. Oleh karena itu agar pelaksanaannya tepat sasaran dengan indikator tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang telah dibentuk, baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Program Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani telah diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) yang telah diberlakukan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

b. Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Petani melalui Pengembangan Kelembagaan Pertanian

Peranan petani dan kelompok tani sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, maka dimasa mendatang peningkatan kemampuan petani dan kelompok tani senantiasa perlu mendapat prioritas untuk penanganannya. Untuk mewujudkan hal tersebut maka yang utama perlu mendapat perhatian adalah peningkatan kemampuan para ketua kelompok tani, karena kemampuan para ketua kelompok tani ini dapat berperan dalam membawa para anggota petani-nelayan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ketua kelompok tani diharapkan makin mengerti dengan permasalahan dalam pembangunan pertanian di wilayahnya, menghayati dan mengerti keinginan/aspirasi petani/nelayan, mampu membangun hubungan kerja yang harmonis dengan unit kerja/instansi/badan pemerintah, swasta, koperasi maupun lembaga-lembaga lain guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani-nelayan.

Sesuai dengan dinamika masyarakat yang senantiasa berkembang, maka para kelompok tani diharapkan dapat menyusun rencana kerja secara baik dan mampu membaca peluang pasar, sehingga kelompok tani diharapkan dapat menjadi wahana yang efektif, dengan demikian aspirasi petani secara nyata dapat tertampung, sehingga program dapat disusun dan diharapkan dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan petani anggota.

Banyak kelembagaan pertanian berdiri, baik itu yang beranggautakan petani, nelayan maupun pedagang. Namun belum ada forum yang mewadahi kelembagaan tersebut, agar antar lembaga tani tersebut dapat saling bersinergi maka perlu dibentuk suatu forum kelembagaan petani yang terdiri dari HKTI, KTNA, HNSI, Perhaptani, dll;

c. Fasilitasi Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan

Salah satu terobosan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga petani adalah dengan meluncurkan "Program Pengembangan Pertanian Modern" yang berbasis pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian secara penuh, mulai tahap pengolahan tanah sampai panen dan pasca panen. Program ini bertujuan untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja yang menyebabkan biaya produksi yang semakin tinggi, mempercepat proses produksi, menekan kehilangan hasil dan meningkatkan pendapatan petani sehingga menarik generasi muda untuk terlibat pada sektor pertanian. Komoditas pertanian unggulan agar dapat didorong dan dipacu agar dapat menaikkan Nilai Tukar Petani (NTP) sehingga kesejahteraan masyarakat tani semakin membaik. Berbagai terobosan kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan keluarga petani telah dilakukan. Upaya khusus untuk melakukan peningkatan produksi, nilai tambah, kualitas dan pasar produk pangan dan pertanian telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani. Upaya Diversifikasi pangan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan pendapatan keluarga telah dilakukan, diantaranya melalui program pengembangan industri pangan rumah tangga dan pengembangan komoditas pangan strategis.

d. Fasilitasi Peningkatan Produksi Peternakan.

Pembangunan peternakan merupakan bagian pembangunan nasional yang sangat penting. Hal itu dikarenakan salah satu tujuan pembangunan peternakan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul. Selain itu, tujuan penting dalam pembangunan peternakan adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, pelestarian lingkungan hidup serta peningkatan devisa negara.

Permintaan dunia terhadap pangan hewani (daging, telur dan susu serta produk olahannya) sangat besar dan diproyeksikan akan meningkat sangat cepat selama periode tahun 2005–2020 mendatang khususnya di negaranegara sedang berkembang. Penduduk dunia saat ini sekitar 6,3 milyar dan diperkirakan meningkat sebanyak 76 juta jiwa setiap tahunnya. Dari jumlah penduduk tersebut, sekitar 5,3 milyar (84%) diantaranya berdomisili di negara-

negara sedang berkembang yang rata-rata tingkat konsumsi protein hewannya relatif sangat rendah. Indonesia termasuk negara sedang berkembang, dengan jumlah penduduk sekitar 212 juta jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,5% per tahun serta peningkatan pendapatan per kapitanya sekitar 3% per tahun. Dari jumlah penduduk tersebut tentunya membutuhkan pangan hewani yang cukup besar dan diproyeksikan meningkat sangat cepat dimasa mendatang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya protein hewani juga ikut mendorong meningkatnya permintaan terhadap pangan hewani. Untuk memenuhi permintaan tersebut, produksi ternak domestik belum mampu untuk mencukupinya, sehingga harus dipenuhi melalui impor yang cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tanpa impor, terjadi pengurasan ternak lokal atau konsumsi protein hewani

e. Fasilitasi Penyelenggaraan Soropadan Agro Expo (SAE) ke 9 Tahun 2019

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi agribisnis yang sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai salah satu penggerak pembangunan, kontributor pemasukan devisa sekaligus sarana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Menyadari potensi yang sangat strategis tersebut, maka pemerintah berkewajiban berupaya menciptakan peluang pengembangan pasar komoditas agro melalui kegiatan Soropadan Agro Expo (SAE) yang merupakan agenda rutin dan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali yang diharapkan mampu menciptakan peluang pasar dan memperluas jejaring pemasaran dengan tetap menjaga kualitas produk agro di pasar global, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan, dan secara simultan berdampak positif pada peningkatan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SOROPADAN AGRO EXPO (SAE) merupakan event dua tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka upaya untuk mewujudkan tiga sektor utama pembangunan ekonomi Jawa Tengah yaitu meningkatkan usaha pemasaran dan promosi potensi komoditi agro, peningkatan jaringan kemitraan antara petani dengan pembeli, serta para pelaku bisnis dan stakeholder.

Soropadan Agro Expo (SAE) adalah sebagai salah satu upaya untuk menciptakan peluang pengembangan pasar komoditas agro dan dirancang secara khusus sebagai ajang untuk mempromosikan potensi agribisnis Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan daerah lain di luar Provinsi Jawa Tengah, serta untuk mempertemukan antara produsen dengan pembeli/*buyers*, kalangan investor dari dalam negeri maupun luar negeri, pelaku agribisnis, para pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun

Pemerintah Pusat yang bertujuan mengakselerasi pembangunan agribisnis di Jawa Tengah.

## **2. Maksud**

Maksud dilaksanakannya kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah dalam rangka mendukung tercapainya kegiatan strategis di Provinsi Jawa Tengah.

### **Tujuan kegiatan tersebut adalah :**

- a. Melaksanakan koordinasi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Provinsi Jawa Tengah;
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
- c. Mengkoordinasikan OPD Lingkup Pertanian dalam mengawasi pengadaan, ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai di tingkat Kabupaten/Kota;
- d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pengembangan Kartu Tani sebagai alat Penebusan Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah baik dengan pihak IT, PT. BRI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan , OPD terkait di Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya ;
- e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pertemuan dan Pembinaan Kelembagaan Pertanian yang ada di Jawa Tengah ;
- f. Menyelenggarakan even Promosi Pembangunan Pertanian pada kegiatan Soropadan Agro Expo ke 9;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembinaan kelembagaan pertanian lainnya

## **3. SASARAN**

Sasaran kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah Pemerintah Pusat (Kementerian terkait), SKPD terkait Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah serta stakeholder pelaksana kegiatan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, BUMN, Swasta

## **4. KELUARAN (OUTPUT)**

- a. Monitoring pengembangan sistem kartu tani
- b. Penyelenggaraan dan monitoring Soropadan Agro Expo IX
- c. Monitoring Program pengentasan Desa Miskin dilihat dari kepemilikan lahan pertanian

- d. Monitoring Penyaluran pupuk bersubsidi oleh tim KP3
- e. Monitoring pengembangan kelembagaan pertanian
- f. Monitoring Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Jawa Tengah

**5. MANFAAT**

- a. Termonitornya kegiatan pengembangan Kartu Tani ;
- b. Terselenggaranya Kegiatan Soropadan Agro Expo (SAE) 9 Tahun 2019
- c. Termonitornya kegiatan pengentasan Desa Miskin dilihat dari kepemilikan lahan;
- d. Termonitornya penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Tengah;
- e. Termonitornya Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Jawa Tengah;
- f. Termonitornya Pelaksanaan Pekan Daerah (PEDA) Petani Nelayan Jawa Tengah

**6. DAMPAK (IMPAK)**

- a. Terlaksananya monitoring Pengembangan Kartu Tani ;
- b. Terlaksananya Penyelenggaraan Soropadan Agro Expo (SAE) 9 Tahun 2019
- c. Terlaksananya Pengentasan Desa Miskin dilihat dari Kepemilikan Lahan;
- d. Tertibnya penyaluran pupuk bersubsidi ;
- e. Terlaksananya monitoring Peningkatan Produksi Pertanian , Perkebunan dan Peternakan di Jawa Tengah;
- f. Terlaksananya Pekan Daerah (PEDA) Petani Nelayan Jawa Tengah

**7. RENCANA PENGANGGARAN**

NO	TAHAP KEGIATAN	RINCIAN	KET
1.	Persiapan	a. Penyusunan RKO b. Persiapan pelaksanaan	
2.	Pelaksanaan	a. Monitoring peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan b. Konsultasi dan koordinasi peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan c. Monitoring Pengembangan Sistem Kartu Tani; d. Monitoring dan Penyelenggaraan Soropadan Agro Expo ke 9 Tahun 2019; e. Monitoring Program Pengentasan desa miskin dilihat dari Kepemilikan lahan pertanian.	
3.	Pelaporan	Penyusunan laporan monitoring peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	5 dokumen

## JADWAL KEGIATAN.

NO	SUB KEGIATAN	WAKTU (BULAN)
1.	Persiapan : a. Penyusunan RKO b. Persiapan pelaksanaan	Januari 2019
2.	Pelaksanaan a. Monitoring peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ; b. Konsultasi dan koordinasi peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; c. Monitoring Pengembangan Sistem Kartu Tani; d. Monitoring dan Penyelenggaraan Soropadan Agro Expo ke 9 Tahun 2018; e. Monitoring Program Pengentasan desa miskin dilihat dari Kepemilikan lahan pertanian	Pebruari - November 2019
3.	Pelaporan Penyusunan laporan monitoring peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Desember 2019

## PENUTUP

Proposal kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2019, sehingga keluaran yang dihasilkan dapat mendukung capaian program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 2018

KEPALA BAGIAN KETAHANAN PANGAN,  
KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN

Ir. DIAH KUSUMARINI, MSi  
NIP. 19610404 198603 2 009